




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 140/360/ TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS PENANGANAN DARURAT PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA ANGIN KENCANG DAN GELOMBANG PASANG DI KECAMATAN TAHUNA, KECAMATAN TAHUNA TIMUR, KECAMATAN KENDAHE, KECAMATAN NUSA TABUKAN DAN KECAMATAN KEPULAUAN MARORE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana angin kencang dan gelombang pasang yang melanda Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Nusa Tabukan dan Kecamatan Kepulauan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 12 Juli 2018, maka perlu dilakukan penanganan darurat;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Keputusan Bupati Nomor 127 / 360/ Tahun 2018 tentang Penetapan Status Penanganan Darurat Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang dan Gelombang Pasang yang melanda Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Nusa Tabukan dan Kecamatan Kepulauan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu menetapkan Perpanjangan Status Penanganan Darurat Pada Masa Tanggap Darurat;
  - c. bahwa dalam rangka upaya penanganan keadaan darurat yang masih terus dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana, sehingga ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat; 

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Penanganan Darurat Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang dan Gelombang Pasang di Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Nusa Tabukan dan Kecamatan Kepulauan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Penanganan Darurat Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang dan Gelombang Pasang di Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Nusa Tabukan dan Kecamatan Kepulauan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- KEDUA : Penetapan Perpanjangan Status Penanganan Darurat sebagaimana diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Angin Kencang dan Gelombang Pasang yang berlangsung selama 21 (dua puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 31 Juli 2018  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA